

# Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Muhammad Fariz Adhitya <sup>1)</sup>; Juliana Nasution <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: <sup>1)</sup> [farizadhitya123@gmail.com](mailto:farizadhitya123@gmail.com); <sup>2)</sup> [juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

## ARTICLE HISTORY

Received [9 Maret 2022]

Revised [5 April 2022]

Accepted [11 April 2022]

## KEYWORDS

Analysis, Performance,  
Regional Revenue and  
Asset Financial  
Management Agency  
(BPKPAD)

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



## ABSTRAK

Tujuan dari riset ini ialah untuk memperoleh visi kinerja pengelola barang milik daerah, Badan Pertanahan dan financial Kota Binjai (BPKPAD). Sebagai Bendahara Daerah, BPKAD merupakan organisasi teknis yang bertanggung jawab menerima pendapatan daerah dan membiayai kebutuhan daerah melalui Departemen financial Daerah. Kehadiran Perbendaharaan daerah memungkinkan daerah untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai belanja daerah. Departemen Perbendaharaan Daerah juga dapat digunakan untuk mengetahui Apa kekayaan suatu daerah. Kas daerah sendiri juga termasuk dalam neraca komparatif, yang merupakan bagian dari laporan financial. Survei cash management sebelumnya menerima pendapatan daerah dan menggunakan dana yang dibayarkan untuk belanja daerah. Pedoman administrasi pelaksanaan APND kota Binjai mengatur bahwa tata cara penerimaan dan pembayaran uang tunai ditangani langsung oleh Kementerian financial membuktikan fungsinya sesuai dengan pedoman tersebut. Secara umum kinerja Pengelolaan Aset BPPKAD Kota Binjai saat ini belum baik dan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja Manajemen Aset BPPKAD saat ini: akuntabilitas, transparansi, dan profitabilitas. Efisiensi dan efektivitas perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan APBD untuk menyediakan financial daerah.

## ABSTRACT

The purpose of this research is to obtain an overview of the performance of regional property managers, the Land and Finance Agency of Binjai City (BPKPAD). As the Regional Treasurer, BPKAD is a technical organization that is responsible for receiving regional revenues and financing regional needs through the Ministry of Regional Finance. The presence of the regional treasury allows the regions to regulate the availability of sufficient funds to fund regional expenditures. The Regional Treasury Department can also be used to find out what the wealth of an area is. The regional treasury itself is also included in the comparative balance, which is part of the financial statements. The previous cash management survey received regional revenues and used the funds paid for regional expenditures. The administrative guidelines for the implementation of the Binjai City APND stipulate that the procedures for receiving and paying cash are handled directly by the Ministry of Finance, and the Ministry of Finance has carried out its functions in accordance with these guidelines. In general, the performance of Binjai City BPPKAD Asset Management is currently not good and still not optimal. This can be seen from the metrics used to measure the current performance of BPPKAD Asset Management: accountability, transparency, and profitability. Efficiency and effectiveness need to be improved in order to increase APBD revenues to provide regional finance.

## PENDAHULUAN

Terjadinya reformasi pemerintahan diingat sebab pemberdayaan penentuan nasib sendiri. Otonomi masyarakat adalah kekuasaan negara untuk secara mandiri yaitu dapat dikatakan berarti memiliki kekuatan besar dalam mengelola anggarannya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 1999 dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Ketetapan MPR tentang "Menyelenggarakan Otonomi Daerah, Mengatur, Membagi dan Menggunakan SDN Secara Adil, dan Keuangan Pusat dan Daerah". Berawal dari isu tersebut. Keseimbangan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Mardiasmo, 2002: 45). Ketentuan MPR ini menjadi dasar hukum lahirnya PERPU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Langkah awal dalam mewujudkan swasembada masyarakat ialah penerapan UU No. 22 tahun 1999.

Saat berkembangnya sistem nasional, Undang-Undang Nomor 32 Republik Indonesia diundangkan yang dapat membuat perubahan signifikan seperti PERPU 58 tahun 2005. Pemerintah Daerah perlu mandiri dalam mengelola pembiayaan kebutuhan anggarannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan sumber pendapatan lokal untuk meningkatkan pendapatan lokal.

## LANDASAN TEORI

Penerimaan dan pembayaran dana di daerah menjadi tanggung jawab utama Presiden Akuntansi Daerah (BUD). BUD adalah pengatur keuangan daerah yang bertanggung jawab atas mengelola APBD dan segala bentuk kekayaan lainnya di daerah (Nurlan Darise, 2008:20). Properti daerah kadang-kadang disebut sebagai properti daerah. Secara umum, barang atau inventaris dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu aset financial (aset lancar) dan aset non financial (aset tidak lancar). Seluruh aset financial ialah aset pemerintah berupa kas dan aset lainnya yang dapat dikonversi menjadi kas dan setara kas dalam waktu 12 bulan sejak tanggal neraca.

Harta non-financial, di sisi lain, ada dalam bentuk persediaan dan aset tetap swasta, sangat diketahui dengan jelas menyatakan bahwa sisa surplus anggaran (selanjutnya disebut SILPA) ialah selisih antara penerimaan anggaran dengan realisasi belanja Per-periode.

Pengelolaan financial Daerah dalam wilayah metropolitan ialah tugas Pengelola Pendapatan, financial, dan Aset Daerah (BPKAD), badan yang berwenang menyelenggarakan terkait pemerintahan di bidang pendapatan, financial, dan tata usaha, pokok dan barang milik daerah. Merupakan lembaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip swadaya dan tugas penunjang, serta bertanggung jawab penuh. BPKAD bertanggung jawab atas financial daerah dan juga berfungsi sebagai departemen keuangan umum daerah.

BPKAD sebagai Departemen Perbendaharaan Daerah merupakan lembaga staf mengklaim pendapatan serta mendanai kebutuhan daerah dengan Departemen Perbendaharaan daerah. Mengingat dana daerah, sehingga wajib mengatasi adanya dana yang memadai guna menangani pengeluaran daerah. Departemen Perbendaharaan Daerah Bisa juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar harta di suatu daerah. Perbendaharaan itu sendiri termasuk dalam neraca komparatif, ialah bagian dari akuntansi tahunan.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara kerja pemerintah, keuangan, dan badan pengelola barang milik daerah dalam mengelola barang milik daerah. khususnya aset likuid. Aset lancar dikategorikan sebagai keuangan daerah, Piutang lokal, deposito jangka pendek dan persediaan. PERPU 58 Tahun 2005 mengharuskan financial daerah, pengelolaan piutang daerah, investasi jangka panjang dan pengelolaan persediaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

Ialah survei deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif suatu metode riset berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini menjadi fokus penelitian: badan pengatur. Aset dan Keuangan Daerah (BPKPAD) di Binjai. Pengumpulan data bersifat kualitatif. Mengambil data dari observasi serta wawancara. Jenis data yang ialah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dan penelusuran literatur. Data sekunder berupa penelitian atau melalui penelitian kepustakaan, tetapi dalam bentuk dokumen, jurnal, website, dan makalah akademis tentang masalah penelitian.

Pengambilan sampel secara langsung. Directed sampling mengambil sampel dengan mengidentifikasi informan utama. Teknik ini menuntut informan untuk mengetahui masalah yang diteliti. Dengan mencalonkan informan, informan terpilih dapat menunjuk informasi yang lebih luas dan memperoleh data yang lebih lengkap. Validasi data dapat digunakan dengan beberapa teknik seleksi segitiga. Triangulasi yang dilakukan dalam survei ini adalah triangulasi data. Metode ini Instruksikan peneliti untuk menggunakan berbagai sumber data yang tersedia saat mengumpulkan data. Dalam segitiga data, peneliti menggunakan beberapa tanggal yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama.

Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan validasi.

- a. Mitigasi Data Reduksi ialah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dari catatan lapangan. Sajikan data dalam
- b. Menampilkan secara sistematis.
- c. Inferensi dan Verifikasi Inferensi ialah pemakaian data untuk menarik dan mengkonfirmasi kesimpulan dengan menganalisis lebih lanjut reduksi dan visualisasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Kas**

Kas Kota Binjai ada di Kementerian Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran, kas ada di Akuntan Pendapatan yang Diharapkan, dan kas ada di Akuntan Pengeluaran.

Kas yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Daerah meliputi kas yang dikelola, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh BPPKAD Kementerian Keuangan Daerah. Kas yang dikenakan saldo adalah kas yang dikenakan saldo masing-masing SKPD. Bendahara Pendapatan Kas meliputi semua Saldo rekening bank dan saldo kas yang bertanggung jawab untuk akuntansi pengeluaran. Akuntansi pengeluaran, di sisi lain, dikelola oleh akuntansi pengeluaran masing-masing SKPD dan berasal dari sumber keuangan yang tersisa. Sampai dengan tanggal neraca, tenaga kerja dibayar di muka belum dibayarkan kepada Kementerian financial.

Perbendaharaan regional mencatat atau menerima semua pendapatan yang dihasilkan oleh Metrocity, mencatatnya sebagai tanda terima dalam pembukuan Perbendaharaan, dan menyimpannya di rekening bank federal. Aset Kota Binjai disimpan dalam rekening berupa uang tunai dan surat berharga. Anda dapat mengetahui semua kekayaan tentang aset likuid kota Binjai melalui penjelasan umum Kementerian Keuangan Daerah. Bagian pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menerima dan mencatat semua simpanan, tetapi juga melakukan pengelolaan keuangan lainnya, seperti membayar dana dan mengelola kas yang tidak terpakai.

Manajemen kas negara bertanggung jawab untuk membayar dana tersebut. Dana akan dibayarkan berdasarkan DPA SKPD (Penerimaan Anggaran Pokja Daerah), usulan anggaran kas SKPD yang disetujui pada saat penganggaran. Pembayaran dana dapat dilakukan dengan menggunakan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).

### **Pengelolaan Piutang**

Tuntutan ialah hak Pemerintah Kota Binjai untuk menerima pembayaran dari organisasi lain, termasuk wajib pajak, yang dilakukan oleh Kota Binjai. Tagihan oleh Pemerintah Kota Binjai terdiri dari tagihan pajak dan kewajiban, tagihan pajak daerah, tagihan pinjaman Kota Binjai kepada BUMN/D, tagihan penjualan angsuran, dan tagihan ganti rugi (TGR). Untuk pengelolaan piutang, BPPKAD memiliki kemampuan kompilasi dan tuning. Fungsi penagihan atau BPPKAD mengumpulkan semua tagihan SKPD, dan fungsi koordinasi atau BPPKAD berkoordinasi dengan SKPD tentang penagihan tagihan.

### **Pengelolaan Persediaan**

Inventaris Kota Metro belum memiliki mekanisme khusus untuk mengatur persediaan agar tidak hanya berjalan di akhir tahun. Inventarisasi Kota Metro diproses langsung oleh SKPD SKPD. Setiap SKPD melakukan inventarisasi setiap akhir tahun dan melaporkannya kepada BPPKAD. BPPKAD menerima laporan tersebut dan menyusunnya menjadi laporan akhir tahun. Persediaan terbatas pada persediaan saja, karena tidak ada mekanisme khusus untuk mengatur persediaan.

### **Pelaksanaan Tupoksi di BPKAD Kota Metro**

BPPKAD telah memenuhi kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan TUPOKSI dalam pengelolaan aset lancar. BPPKAD selalu mengacu pada peraturan yang ada, terutama dalam mengelola kasir lokal dan alat likuid umum. B. Peraturan Bupati, Pedoman Tata Usaha Negara, dan Pedoman Sistem dan Prosedur. Fungsi BPPKAD dalam pengelolaan kekayaan lancar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

### **Pertanggung Jawaban BPKAD Kepada Masyarakat**

Tanggung jawab BPPKAD saat mengelola modal kerja ialah penyusunan laporan. Laporan tersebut berupa neraca perbandingan yang merupakan bagian dari laporan tahunan Pemerintah Kota Binjai. Laporan tersebut merangkum semua aset lancar pada akhir tahun. Pertanggungjawaban BPPKAD dalam pengelolaan modal kerja merupakan tanggung jawab BPPKAD kepada Bupati yaitu menyusun laporan keuangan yang memuat laporan kinerja APBD, neraca komparatif, dan laporan arus kas. Aset lancar termasuk dalam neraca komparatif. Alur pertanggungjawabannya ialah BPPKAD bertanggung jawab kepada Bupati dan pelaporan keuangan diaudit oleh BPK.

### Indikator Tranparansi

Transparansi pengelolaan modal kerja ditunjukkan dengan keterbukaan BPPKAD untuk menyediakan informasi modal kerja kepada publik, baik diminta oleh masyarakat umum maupun tidak. Informasi aset lancar yang disediakan oleh BPKPAD diperoleh dari neraca komparatif yang merupakan bagian dari Neraca Tahunan Kota Binjai. Informasi dikomunikasikan melalui media massa khususnya media internet khususnya website dan surat kabar Kota Binjai.

Transparansi yang diberikan oleh situs web tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat umum. Hal ini masih bersifat tradisional dan dikarenakan kondisi masyarakat yang rata-rata tinggal di pedesaan. Selain itu, situs web Kota Metro tidak selalu mudah diakses karena situs web tersebut tidak terawat. Akibatnya, informasi jarang diperbarui dan sulit diakses. Alat likuid surat kabar juga gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi alat likuid. Informasi yang disampaikan hanya sebulan sekali tidak memenuhi kebutuhan modal kerja masyarakat. Bahkan terkesan bahwa informasi yang dikirimkan melalui website dan surat kabar hanya bersifat formal dan hanya meniadakan kewajiban transparansi. Pengungkapan informasi aset lancar akan dilakukan lebih tepat dengan memasangnya di papan pengumuman tempat pertemuan. Ketika ini terjadi, masyarakat umum memiliki akses mudah ke informasi tentang aset lancar.

Transparansi alat likuid BPKAD Kota Binjai kepada masyarakat luas dikomunikasikan melalui website dan surat kabar Kota Binjai. Informasi disediakan di situs web dan surat kabar, tetapi tidak memberikan akses mudah ke informasi tentang alat likuid bagi masyarakat umum dan terbatas pada pencabutan kewajiban. Selain situs web dan surat kabar, informasi modal kerja juga harus dipasang di papan buletin setiap gedung pertemuan untuk membantu masyarakat umum lebih memahami tantangan modal kerja.

### Indikator Ekonomi

BPS Kota Binjai mencatatkan produk domestik bruto daerah (BRDP) sebesar Rp 11,77 triliun pada tahun 2020. Perekonomian kawasan, yang menyumbang 29% dari PDB, terutama ditopang oleh grosir dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya, sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 12%.

Kedua, industri manufaktur menyumbang 11%. Selain itu, sektor real estate dan sektor transportasi dan penyimpanan masing-masing menyumbang 8% terhadap total PDB Binjai.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Keuangan dan Akuntansi Kementerian Keuangan (DJPK), total pendapatan Binjai mencapai R881,73 miliar pada 2020. Dana meratakan tersebut menyumbang Rp665.810 juta atau 75% dari total pendapatan, dan menjadi dana terbesar untuk mendukung pembangunan kota Binjai. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 112,27 miliar atau 13 persen dari total pendapatan tahun berjalan. Di sisi lain, sumber pendapatan daerah lain yang sah menjadi penyumbang paling kecil, yakni Rp 103,65 miliar, atau 12 persen dari total pendapatan. Ditelusuri, realisasi PAD di Kota Binja didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp 65,33 miliar atau 58% dari total PAD. Selain itu, PAD sah lainnya menyumbang Rs 39,75 miliar atau 36,5 Ri total PAD. Di sisi lain, hasil pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah masing-masing memberikan kontribusi yang kecil, masing-masing mencapai Rp3,69 miliar dan Rp3,51 miliar.

### Indikator Efisiensi

Efisiensi ekonomi dinilai dari apakah penggunaan modal kerja untuk menilai kinerja telah digunakan dengan baik, yaitu guna menepati kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah dituangkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang disiapkan oleh SKPD untuk penggunaan anggaran. DPA memiliki rencana anggaran satu tahun untuk SKPD yang mencakup pengeluaran. Dengan peningkatan efisiensi, dapat dikatakan bahwa uang tunai memenuhi semua kebutuhan SKPD. BKAD sebagai Departemen Perbendaharaan Daerah mengeluarkan jumlah sesuai dengan DPA yang masuk dalam APBD. Pengeluaran tersebut dianggarkan oleh APBD dan tidak boleh melebihi pendapatan asli daerah agar dana yang dikelola oleh keuangan daerah dapat menutupi seluruh kebutuhan SKPD. Semua biaya digunakan dengan benar. Belanja daerah dilaksanakan dengan baik sesuai anggaran belanja APBD, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam belanja daerah.

Efisiensi dicapai dengan memilih kegiatan yang dapat diprogram, sehingga pendapatan yang dihasilkan setiap tahun cukup untuk memenuhi kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun. Efisiensi yang telah dilaksanakan BPKPAD sebagai Pejabat Perbendaharaan Umum Daerah (BUD) telah dilaksanakan sejak pembuatan DPASKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokja Daerah).

Ketika pengelola SKPD menyampaikan program dan kegiatan satu tahun kepada DPA, sangat penting bagi BPPKAD untuk memilih dari awal apakah program atau kegiatan tersebut benar-benar penting.

## Indikator Efektivitas

Biaya administrasi adalah pegawai belanja aspirik tinggi dan mereka yang tertarik pada komunitas, 25%. Focs Daripem Bay Ananininin Jepang Selatan Japagawa Harnica Lenada Lam Dow benar-benar dialokeuntunkhanjajiaiai. SushedgaprioritOtamadaDalamengeludaRahlahlah Mata-mata pemuda. Karena itu, untuk gizi masyarakat, itu adalah penyakit setelah melayani berita. Dana yang ditujukan untuk kegiatan adalah masyarakat untuk melupakan partisipasi. Tujuan kepentingan umum pengelolaan alat likuid belum memenuhi kepentingan umum. Hal ini dikarenakan semua pengeluaran hanya dihabiskan untuk biaya tenaga kerja. Dari sisi efektivitas, BKAD masih belum efektif karena belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

BPPKAD sebagai biro teknis Kota Binjai menjalankan fungsi pemerintah untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi efektifitas, BPPKAD tidak efektif karena tidak memenuhi harapan masyarakat. Keuangan daerah yang bertugas menerima dan membayar kegiatan masyarakat sebagai bagian dari modal kerja justru lebih banyak menghabiskan dan mengutamakan biaya tenaga kerja. Dengan pendapatan yang minim dan biaya yang meningkat, uang yang digunakan masyarakat otomatis kecil, sehingga tidak mungkin untuk menjustifikasi kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Aset lancar yang dikelola BPKPAD Kota Binjai terdiri dari kas, piutang dan pengelolaan persediaan. Selama ini Kota Binjai belum memiliki mekanisme khusus untuk mengatur pengelolaan inventaris. Di antara indikator kinerja seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, diperlukan perbaikan dari berbagai bidang seperti peningkatan keuangan daerah. Efisiensi juga perlu ditingkatkan agar pendapatan tahunan yang dihasilkan dapat menutupi kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun.

BPKPAD Kota Binjai perlu meningkatkan koordinasi dengan SKPDSKPD terkait penyampaian laporan keuangan tahunan. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan batas waktu pengumpulan laporan keuangan yang telah disepakati oleh BPPKAD dan masing-masing SKPD. BPKPAD akan mengawal penyampaian pengaduan oleh SKPDSKPD. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki keterlambatan penyampaian pengaduan yang diajukan oleh SKPD atau SKPD, tetapi tidak benar-benar melaporkan pengaduan tersebut ke BPKAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik Malang: Banyumedia
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Terakreditasi: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Erlangga. Darise, Nurlan, 2008. Pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jakarta: PT indeks. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-2). JAKARTA: Balai Pustaka Handoko, Hani T. 1995. Manajer. Yogyakarta: BPFE.
- Hansen, Don R & Mowen, Maryanne. M. 1997. Akuntansi Manajemen (4. Auflage Bd. 2). Jakarta: Erlangga
- Harim, Abdul. 2004. Akuntansi sektor publik Akuntansi keuangan daerah (versi revisi). Jakarta: Salemba Empat
- Harim, Abdul & Damayanti, Teresa. 2007. Pengelolaan keuangan daerah (aplikasi di bidang pendidikan, hukum, ekonomi dan manajemen, IPS, humaniora, politik, agama dan filsafat). Jakarta: Pers Gema Persada. Keban, Yeremias T. 2008. Enam dimensi strategis konsep manajemen publik, teori dan isu. Yogyakarta: Gabber Media.
- Keown, Arthur J dan lain-lain. 2008. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah: Pandu mahmudi 2007.
- Analisis laporan keuangan daerah: pedoman bagi pimpinan, DPRD dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasm. 2004, Akuntan Bersertifikat. Yogyakarta
- Andy. 2002. Pengelolaan keuangan daerah dan otonomi. Yogyakarta
- AndiMoleong, Lesy J2000. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Pemuda Ross Dakariya
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Manajer Sumber Daya Manusia (Tips Membangun Organisasi Kompetitif untuk Perdagangan Bebas Global). Yogyakarta: BPFE
- Rai, I Gusti Agung 2008. Tinjauan Kinerja Puda Sektor Publik. Jakarta: 4 Salemba

- Ratminto & Winarsih, Septiatik. Tahun 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Studentenbibliothek.
- Ruky, Ahmad S. 2002. Sistem Manajemen Kinerja (Panduan Praktis untuk Merancang dan Mencapai Keunggulan dalam Sistem Manajemen Kinerja). Jakarta: Gramedia.
- Sinambela, Poltak Lijan 2008. Reformasi Kepegawaian: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Earth Liter
- Ini Sugi. 2006 Metode penelitian administratif (dilengkapi dengan metode penelitian dan pengembangan). Bandung: Alfa beta.
- Stopo, HB. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Teori dasar dan penerapannya pada penelitian. Surakarta: University Press, 11 Maret
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Pemerintah. Jakarta: PT. Gramedia
- Yuwono, Sony, dkk. 2008. Pengertian APBD dan Isu: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Malang: Bayumedia.
- Republik Indonesia. Keputusan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerataan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Ma, Jingxie. 2008. Jurnal Internasional Diskusi Pemerintah Daerah Pedesaan tentang Evaluasi Kinerja Bisnis dan Manajemen Kuantitatif). Bande 3 Angka 8.
- Mandy Mock Kim Nan. 2009. Hubungan antara kemampuan yang berbeda, inovasi, jenis strategi dan kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di semua sektor manufaktur di Malaysia (Jurnal Bisnis Internasional) dan Riset Ekonomi). Pita 8 atau 11.